
INDEV: Literasi Media Dakwah dan Pengembangan Masyarakat

Vol. 5 No. 1 (2026). pp. 11-18

ISSN: 3026-5177, DOI: <http://dx.doi.org/10.31958/indev.v4i1.17092>

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

indev@uinmybatusangkar.ac.id

<https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/indev>

Direct Cash Assistance (BLT) Strategy to Support Community Economic Resilience in Nagari Koto Tuo Lima Puluh Kota

¹ Hilda Suryanis, ² Mami Nofrianti, ⁴ Beni Putra Hanafi

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

E-mail: ¹ hildasuryanis16@gmail.com

Received: 15 January 2025

Revised: 12 February 2025

Accepted: 9 May 2025

Abstract

The main problem in this thesis is how the strategy used in the Direct Cash Assistance (BLT) program implemented in Koto Tuo Village, Harau District, Lima Puluh Kota Regency, supports community economic resilience. This includes the planning, implementation, and monitoring stages of the BLT program. Furthermore, the problem also focuses on the extent to which the BLT program can improve community economic welfare and encourage empowerment for recipients, as well as the challenges faced during its implementation at the village level. Qualitative approach. Qualitative research is based on honest, as-is statements, used to observe the condition of a natural object, for which this research serves as a key instrument. Data collection techniques used are triangulation (combined), data analysis contains qualitative data, and qualitative results emphasize meaning over generalization. From the fieldwork conducted by the researcher, it can be concluded that the Direct Cash Assistance (BLT) strategy in Koto Tuo Village, Harau District, Lima Puluh Kota Regency, has been implemented through planning, implementation, and monitoring stages, involving the village government and local community elements. During the planning stage, BLT recipients were determined through a special village meeting and established criteria to ensure appropriate distribution. BLT implementation followed existing regulations, although several challenges remained, such as budget limitations and beneficiary data collection. Meanwhile, oversight was carried out by the village government and relevant institutions to mitigate potential irregularities in aid distribution. The BLT program has had a positive impact on the economic resilience of recipients, particularly in meeting basic needs and reducing household economic stress. However, in terms of community empowerment, the Direct Cash Assistance (BLT) is still temporary and has not yet fully encouraged recipients' economic independence. Key challenges in implementing BLT include limited funding, inaccurate recipient data, and the dependence of some communities on aid. Therefore, a follow-up strategy is needed that combines BLT with economic empowerment programs to achieve sustainable community economic resilience.

Keywords: Strategy, Direct Cash Assistance, Community Economic Resilience, Welfare

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan isu krusial di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang kaya akan sumber daya alam. Meski demikian, banyak masyarakat Indonesia masih terperangkap dalam kemiskinan, memperburuk kondisi tersebut setiap tahunnya. Tingginya angka kemiskinan juga merupakan tantangan yang dihadapi banyak negara di dunia. Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program, salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini diberikan kepada individu miskin yang memenuhi syarat, bertujuan untuk mendukung kesejahteraan dan membantu mereka keluar dari jeratan kemiskinan.

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang sangat berdampak pada pertumbuhan sumber daya manusia, yang artinya kesehatan adalah masalah yang ditangani dan memenuhi pemikiran di seluruh dunia. Menurut WHO (1947), kesehatan didefinisikan sebagai kondisi yang optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan tidak hanya berarti bebas dari penyakit atau kelemahan. Sementara itu, dalam UU No. 23 Tahun 1992 kesehatan diartikan sebagai keadaan sejahtera dari fisik, mental, dan sosial, yang dalam konteks pengaturan jaminan sosial di Indonesia, hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam BAB XIV yang membahas Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, dua pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 33 dan Pasal 34.

Pasal 33 menekankan pada aspek perekonomian nasional, sementara Pasal 34 berfokus pada kesejahteraan sosial. Pada Pasal 34 ayat (1), ditegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Selanjutnya, ayat (2) menyebutkan kewajiban negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, dengan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk menciptakan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara.

Ketahanan ekonomi merupakan pilar utama dalam stabilitas pembangunan nasional, terutama di tingkat unit terkecil pemerintahan, yaitu desa atau Nagari. Dalam

konteks Sumatera Barat, Nagari bukan sekedar unit administratif, melainkan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi dalam mengelola potensi dan kerentanan ekonominya. Salah satu wilayah yang memiliki dinamika ekonomi unik adalah Nagari Koto Tuo di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam proses pembangunan daerah, mengatasi kemiskinan harus menjadi prioritas utama. Upaya atau metode dari Nagari Koto Tuo untuk menjalankan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara individu dan kelompok demi kesejahteraan masyarakat dikenal sebagai pengembangan ekonomi masyarakat. Memberdayakan masyarakat dengan memberikan kekuatan, kemampuan, dan pengetahuan untuk mengelola aset yang ada di dalamnya untuk mencapai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggi adalah cara yang efektif untuk mencapai pengembangan ekonomi masyarakat. Untuk menangani kemiskinan di Nagari Koto Tuo, diperlukan tindakan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh untuk mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga di Nagari Koto Tuo melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Teori Ekonomi Kesejahteraan (Welfare Economics): Menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Samuelson & Nordhaus, 2010). Teori Pemberdayaan (Empowerment): Menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi mereka sendiri (Zimmerman, 2000). Model Ekonomi Sosial (Social Economy Model): Menjelaskan bagaimana bantuan sosial dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat.

Teori Ketergantungan (Dependency Theory): Menjelaskan bagaimana bantuan sosial dapat mempengaruhi ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah (Frank, 1969). Untuk mencapai hasil yang optimal, pemerintah perlu menerapkan Teori Ekonomi Kesejahteraan sebagai basis tindakan, menggunakan Model Ekonomi Sosial dalam pelaksanaannya, menargetkan Pemberdayaan sebagai hasil akhir, sambil tetap memitigasi risiko Ketergantungan.

Total terdapat 35 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terbagi di beberapa jorong, dengan rincian yang menunjukkan perbedaan jumlah penerima di setiap jorong. Jorong Pulutan menempati posisi teratas dengan jumlah penerima tertinggi, yaitu 10

KPM. Ini menunjukkan bahwa Pulutan mungkin memiliki tingkat kebutuhan yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Di sisi lain, Jorong Simpang Ompek dan Taratak Padang Rajo masing-masing memiliki 6 sampai 7 KPM, yang juga menunjukkan kebutuhan signifikan di kedua jorong ini.

Sementara itu, Jorong Tanjung Pati mencatat 5 KPM, menandakan bahwa daerah ini juga mendapatkan perhatian dalam distribusi bantuan. Terakhir, Jorong Padang Rantang dan Koto Tuo memiliki 3 sampai 4 KPM, yang merupakan jumlah terendah di antara jorong-jorong yang tercantum. Secara keseluruhan, pembagian jumlah penerima BLT yang tidak merata ini mencerminkan variasi dalam kondisi sosial dan ekonomi di masing-masing jorong.

Metode

Metode deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mempelajari keadaan, kondisi, atau hal lain yang telah disebutkan sebelumnya, dan kemudian menyampaikan hasilnya dalam laporan penelitian. Peneliti hanya melihat apa yang terjadi pada objek atau wilayah penelitian tanpa menambahkan, menambahkan, atau mengubahnya. Sebaliknya, mereka memaparkan peristiwa dalam laporan penelitian secara langsung. Untuk mendapatkan pemahaman tentang keadaan atau interaksi suatu lembaga, kelompok sosial, atau individu. Penelitian ini akan menyelidiki Strategi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pendekatan kualitatif juga dipilih karena subjek penelitian adalah proses atau kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang nyata tentang BLT.

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Nagari Koto Tuo telah melaksanakan perencanaan BLT secara inklusif dengan melibatkan aparat nagari, kepala jorong, serta Badan Musyawarah Nagari (Bamus). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan, sambil tetap menjaga aspek transparansi dan akuntabilitas di tingkat nagari.

Proses penyaluran BLT dilakukan dengan tepat waktu dan langsung kepada para penerima manfaat, sehingga mereka dapat menggunakan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar Rumah tangga. Kelancaran pelaksanaan ini didukung oleh kolaborasi antar lembaga di nagari, yang menjadi faktor kunci keberhasilan program tersebut. Pengawasan program BLT melibatkan pemerintah nagari, Bamus, pendamping desa, serta masyarakat. Pendekatan pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan transparansi, serta memastikan bahwa bantuan yang disalurkan memberikan dampak positif bagi ketahanan ekonomi masyarakat.

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Masyarakat Di Nagari Koto Tuo: (1) Kerja sama antar lembaga nagari. Hubungan yang baik antara pemerintah nagari, kepala jorong, Bamus, dan pendamping desa mempermudah proses pendataan, penyaluran, dan pengawasan BLT. (2) Keterlibatan masyarakat. Musyawarah nagari sebagai forum untuk menampung aspirasi masyarakat meningkatkan tingkat akuntabilitas serta menjamin bahwa bantuan disalurkan secara tepat. (3) Kesadaran dari penerima masyarakat. Penerima BLT cenderung menggunakan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka secara bijaksana, sehingga berkontribusi pada kestabilan ekonomi keluarga.

Selain faktor pendorong, terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam penyaluran BLT: (1) Kuota penerima yang terbatas. Tidak semua kalangan masyarakat yang mengalami kemiskinan bisa memperoleh bantuan karena jumlah BLT yang tersedia terbatas. (2) Perubahan data masyarakat. Informasi mengenai penerima bantuan seringkali berubah, yang menyebabkan perlunya pembaruan data secara berkala, menyulitkan proses penyaluran. (3) Risiko kecemburuan sosial. Ketidaksamaan status antara penerima dan bukan penerima bantuan bisa memicu konflik sosial dalam komunitas. (4) Ketergantungan pada dana pemerintah pusat. Sumber dana untuk BLT berasal dari pemerintah pusat, sehingga proses penyaluran sangat tergantung pada alokasi dan jadwal yang ditetapkan oleh mereka.

Secara keseluruhan, faktor-faktor pendorong dan penghambat tersebut saling berinteraksi dalam memengaruhi efektivitas BLT faktor pendorong seperti kolaborasi antar lembaga dan partisipasi publik dapat meningkatkan keberhasilan program, sedangkan faktor penghambat menunjukkan perlunya perbaikan dalam mekanisme, pembaruan data, serta integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi agar BLT dapat lebih maksimal dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat.

Adapun dampak BLT terhadap Ketahanan Ekonomi Masyarakat Bantuan Langsung Tunai berfungsi sebagai jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang tergolong miskin ekstrem, membantu mereka mempertahankan daya beli dan menghindari penurunan kualitas hidup. Meskipun bersifat sementara, program ini memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga penerima.

Kesimpulan

Pemerintah Nagari Koto Tuo menerapkan strategi yang komprehensif mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan. Perencanaan dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai elemen lembaga nagari untuk menjamin transparansi. Pelaksanaan penyaluran difokuskan pada ketepatan waktu guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sementara pengawasan dilakukan secara kolaboratif untuk mencegah penyimpangan dan memastikan dampak positif bagi ketahanan ekonomi. Keberhasilan program ini sangat didorong oleh hubungan kerja sama yang harmonis antar lembaga nagari (Pemerintah Nagari, Bamus, Kepala Jorong, dan Pendamping Desa). Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah nagari serta kesadaran penerima bantuan dalam menggunakan dana secara bijaksana menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga.

Meskipun berjalan dengan baik, terdapat beberapa hambatan signifikan, yaitu: Keterbatasan Sumber Daya: Kuota penerima yang terbatas dan ketergantungan penuh pada alokasi dana dari pemerintah pusat. Masalah Administrasi: Dinamika perubahan data penduduk yang memerlukan pembaruan terus-menerus. Dampak Sosial: Adanya risiko kecemburuan sosial di tengah masyarakat akibat perbedaan status antara penerima dan non- penerima bantuan. Strategi penyaluran BLT di Nagari Koto Tuo telah berhasil mendukung ketahanan ekonomi masyarakat melalui pendekatan yang

transparan dan kolaboratif. Namun, efektivitas program ini ke depannya sangat bergantung pada kemampuan nagari dalam mengelola pembaruan data secara akurat dan memitigasi potensi konflik sosial akibat keterbatasan kuota bantuan.

Daftar Pustaka

- Aditama, I. (2022). *Efektivitas pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di era pandemi COVID-19 bagi masyarakat Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Ahmad Soleh. (2011). Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu*.
- Ariefuzzaman, S. N. (2015). Welfare approach untuk Indonesia damai dan sejahtera: Perspektif kesejahteraan sosial. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.15408/empati.v1i1.9658>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Baiq Tisniawati. (n.d.). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat*.
- Chandra Irvanto, J., et al. (2017). *Peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mengurangi tingkat pengangguran Kota Samarinda*. *eJournal Ilmu Pengetahuan*.
- Falah, Y. D. (2023). *Perekonomian Indonesia* (pp. 2–243). Yayasan Darul Falah.
- Ghufron, M. I., & Bustomi, A. A. (2022). Infrastructure development and socio-economic disparities in Indonesian society. *IJED: International Journal of Economy Development Research*, 1(2), 22–33. <https://doi.org/10.33650/ijed.v1i2.5719>
- Hadi, N., Anjasmari, N. M. M., & Noorrahman, M. F. (2025). Studi kasus: Desa Sungai Kuini dan Banyu Tajun Hilir di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(1), 90–102.
- Hennigusnia, & Kurniawati, A. (2021). Constitutional review to the national social security system and the Social Security Administration Body. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 16(2), 103–120.
- Made Ngurah Duwipantara, & Atmadja, A. T. (2022). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat miskin terdampak COVID-19 di Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*.
- Muhammad Ahib Fathurrahman. (2019). *Strategi peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan Desa Wisata Pulesari di Turi Sleman* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).
- Nickols, F. (2011). *Strategy, strategic management, strategic planning and strategic thinking*.
- Nurdiansah, T., & Permatasari, A. (2025). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Karang Agung, Tanjung Palas Utara, Bulungan, Kalimantan Utara. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 12, 1–12.

- Nia Prasetyaningsih. (2019). *Potensi pasar tradisional dalam meningkatkan ekonomi masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam* (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto).
- Rizki Rigeras Aldzuhri, D. (2021). *Peran pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal* (Skripsi Sarjana, Universitas Pancasakti Tegal).
- Sandu, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sani Ridwan. (2022). *Analisis tata kelola Dana Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang di masa pandemi COVID-19 tahun 2021 (Studi kasus Bantuan Langsung Tunai Desa)* (Skripsi, Universitas Medan Area).
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi: Suatu pengantar* (Edisi revisi). PT RajaGrafindo Persada.
- Sri Lestari Rahayu. (2012). *Bantuan sosial di Indonesia*. Fokus Media.
- Sulistio, D. (2011). Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan (JEJAK)*, 4(2), 102–113.
- Suradi. (2007). Pembangunan manusia, kemiskinan, dan kesejahteraan sosial. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(3), 1–11.
- Witono, T. (2020). Pembangunan sosial, kesejahteraan sosial, dan pekerjaan sosial. *Quantum*, 16(1), 63–65.